



UPAYA DAN KONTRIBUSI INDONESIA DALAM PROSES PERDAMAIAN DI AFGHANISTAN MELALUI BINA-DAMAI

Robi Sugara

Prodi Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Abstract

This paper aims to explain the efforts and contributions made by the Government of Indonesia in assisting the peace process in Afghanistan. This study focuses on peacebuilding efforts undertaken by the Government of Indonesia for Afghanistan. This qualitative research with literature studies explains that the peace process in Afghanistan has been going on for a long time, as the conflict has occurred and has involved many parties. The peace process in Afghanistan involves the United Nations (UN), Afghanistan's neighboring countries, major countries, and other international communities including Indonesia. Indonesia's role in the Afghan peace process is not only by garnering support from the international community to continue to help peace in Afghanistan, but also primarily through peace-building through cooperation in the development and capacity building of the government and the people of Afghanistan. Indonesia's efforts to promote peace in Afghanistan also have the support of the international and domestic Afghan community. Peace-building efforts through various capacity building programs in several fields carried out by Indonesia are one of the important steps as a strategy to prevent conflict from returning and which are oriented towards sustainable and long-term peace building in post-conflict Afghanistan. This is Indonesia's contribution to helping create Afghanistan as a safe, democratic and prosperous country as well as for world peace.

Keywords: Afghanistan; peace-building; capacity building; Indonesia.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan upaya dan kontribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam membantu proses perdamaian di Afghanistan. Kajian ini berfokus pada upaya bina-damai (*peace-building*) yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk Afghanistan. Penelitian kualitatif dengan studi pustaka ini menjelaskan bahwa proses perdamaian di Afghanistan sudah berlangsung lama seiring terjadinya konflik yang silih berganti yang telah melibatkan banyak pihak. Proses perdamaian di Afghanistan melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), negara-negara tetangga Afghanistan, negara-negara besar, dan komunitas internasional lainnya termasuk Indonesia. Peran Indonesia dalam proses perdamaian Afghanistan selain dengan menggalang dukungan komunitas internasional untuk terus membantu perdamaian di Afghanistan, juga utamanya melalui jalan bina-damai dengan bentuk kerjasama pengembangan dan pembangunan kapasitas (*capacity-building*) pemerintah dan masyarakat Afghanistan. Upaya Indonesia mendorong perdamaian di Afghanistan ini juga mendapat dukungan komunitas internasional dan domestik Afghanistan. Upaya bina-damai melalui berbagai program *capacity building* di beberapa bidang yang dilakukan Indonesia merupakan salah satu langkah penting sebagai strategi untuk mencegah konflik kembali dan yang berorientasi pada pembangunan perdamaian berkelanjutan dan jangka panjang di Afghanistan pasca konflik. Hal ini merupakan kontribusi Indonesia untuk membantu menciptakan Afghanistan sebagai negara yang aman, demokrasi, dan sejahtera dan juga untuk perdamaian dunia.

Kata Kunci: Afghanistan; bina-damai; *capacity-building*; Indonesia.

PENDAHULUAN

Konflik berkepanjangan di Afghanistan telah melibatkan berbagai pihak komunitas internasional, tidak hanya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tetapi juga berbagai negara termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah lama terlibat dan berkontribusi dalam proses perdamaian dunia sebagai bagian dari komunitas internasional, salah satunya pada proses perdamaian di Afghanistan. Menteri

ARTICLE HISTORY: Submitted: 2021-01-12 | Revised: 2021-01-14 | Accepted: 2021-01-31 | Published: 2020-02-07

HOW TO CITE (APA 6th Edition):

Sugara, R. (2021). Upaya dan Kontribusi Indonesia dalam Proses Perdamaian di Afghanistan Melalui Bina-Damai. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*. 5(1), 27-38.

CORRESPONDANCE AUTHOR: robi.sugara@uinjkt.ac.id | DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v5i1.3414>



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Luar Negeri Retno Marsudi pada tahun 2019 mengatakan bahwa kontribusi Indonesia pada upaya perwujudan perdamaian di Afghanistan yaitu dalam hal menggalang dukungan internasional untuk proses perdamaian di Afghanistan, membangun rasa saling percaya (*trustbuilding*) dan pembangunan perdamaian atau disebut juga bina-damai (*peacebuilding*) melalui *capacity building* untuk aparatur negara ataupun kelompok masyarakat sipil (“Indonesia Siap Berkontribusi Proses Perdamaian Di Afghanistan,” 2019).

Laporan tentang proses perdamaian di Afghanistan dari *National Security Research Division RAND Corporation* pada 2011 memetakan beberapa aktor penting dalam penyelesaian konflik di Afghanistan. Aktor-aktor tersebut dibagi menjadi aktor utama yakni Taliban dan pemerintah Kabul, kemudian aktor “ring dalam” yakni Pakistan dan Amerika Serikat. Selanjutnya aktor pertama yakni India, Iran, dan Rusia. Terakhir adalah aktor kedua yakni Turki, Saudi Arabia, China, dan Eropa. Dari banyak aktor yang terlibat dalam proses perdamaian di Afghanistan, banyak yang bergantung dengan sikap Amerika Serikat tentang apakah perdamaian di Afghanistan akan dinegosiasikan dengan pihak Taliban atau tidak (Shinn & Dobbins, 2011). Freshta Qarqeen dalam penelitiannya pada tahun 2015 menyebutkan bahwa telah banyak yang dilakukan oleh pemerintah Afghanistan dalam proses perdamaian di Afghanistan bahkan juga membuka pembicaraan dengan aktor pemberontak paling penting yakni Taliban (Qarqeen, 2015).

Meskipun Indonesia tidak masuk sebagai aktor dalam pemetaan aktor utama, aktor ring dalam, dan aktor pertama serta kedua dalam penyelesaian konflik di Afghanistan yang dilakukan oleh RAND pada tahun 2011, Indonesia berkontribusi pada proses perdamaian di Afghanistan dalam beberapa hal. Upaya Indonesia dalam membantu proses perdamaian di Afghanistan bisa terlihat dalam setiap kebijakan luar negerinya terhadap Afghanistan. Dalam banyak konferensi internasional terkait dengan Afghanistan, Indonesia menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya proses perdamaian, rekonstruksi, dan rekonsiliasi di Afghanistan, khususnya melalui bantuan *capacity building*, seperti yang disampaikan dalam International Afghanistan Conference (5 Desember 2011) di Bonn Jerman, Kabul Conference (Juli 2010), dan London Conference (Januari 2010) (Kemenlu, 2011). Upaya Indonesia dalam berkontribusi pada proses perdamaian di Afghanistan juga terus dilakukan, salah satunya pada 2019 di mana Indonesia juga berhasil memperjuangkan dukungan internasional untuk perdamaian di Afghanistan salah satunya melalui perpanjangan misi bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Afghanistan yang disebut *United Nations Mission in Afghanistan* (UNAMA) (“Diplomasi Indonesia Loloskan Resolusi DK PBB Tentang Afghanistan,” 2019).

Vinay Kaura mengatakan bahwa konflik Afghanistan multi-dimensi, melibatkan aktor Afghanistan, regional, dan global. Karena kompleksitas yang melekat, tidak ada pelaku tunggal yang memegang kunci penyelesaian krisis sehingga proses perdamaian di Afghanistan berlangsung lama dan sulit serta diliputi skeptisisme (Kaura, 2018). Hojatullah Fazly mengukur keberhasilan perdamaian di Afghanistan dengan teori kontrak sosial di mana kontrak sosial di antara aktor-aktor yang bertikai dianggap tidak berjalan dengan baik. Kegagalan proses perdamaian di Afghanistan dikarenakan pendekatan yang dilakukan lebih mementingkan pada *state building* daripada membangun sebuah kebijakan untuk membangun perdamaian yang lebih luas dengan melibatkan masyarakat Afghanistan untuk merancang dan melaksanakannya (Fazly, 2016). Qarqeen (2015) juga menjelaskan bahwa meski sudah banyak mendapat dukungan komunitas internasional, segala upaya yang sudah dilakukan untuk proses perdamaian di Afghanistan masih belum terlihat efektif karena lemahnya politik pemerintah Afghanistan dan proses negosiasi lebih mengedepankan pendekatan struktural.

Perluasan dalam negosiasi mendapatkan titik terang setelah terjadi tandatangan perjanjian damai antara Amerika dan Taliban di Doha, Qatar pada 29 Februari 2020. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri RI ikut menyaksikan dalam penandatanganan bersejarah yang dinamai Perjanjian Komprehensif untuk Perdamaian Afghanistan atau *Comprehensive Peace Agreement* (CPA)

(“Dorong Perdamaian Di Afghanistan, Menlu RI Saksikan Penandatanganan Perjanjian AS-Taliban,” 2020).

Upaya bina-damai untuk proses perdamaian di Afghanistan pasca konflik merupakan proses yang panjang dan kompleks. Barnett R. Rubin (2006) menggambarkan upaya bina-damai yang selama ini dilakukan justru terhambat oleh perpecahan, persaingan, dan fragmentasi otoritas komunitas internasional. Sedangkan Jonathan Goodhand mengatakan bahwa bina-damai di Afghanistan merupakan tawar-menawar antara penguasa, aktor swasta, dan lembaga ekstraksi. Lembaga ekstraksi amat bergantung pada bisnis narkoba, dimana kondisi konflik dan korupsi di elite Afghanistan dapat melanggengkan lembaga ekstraksi ini (Goodhand, 2008).

Sedangkan upaya bina-damai yang dilakukan oleh Indonesia selama ini juga perlu dilihat dari dua aspek yaitu tantangan dari aktor-aktor internasional yang terlibat dalam proses perdamaian di Afghanistan, dan tantangan domestik seperti pengelolaan pemerintahan yang baik dan komitmen kelompok-kelompok masyarakat yang berkonflik terkait proses bina-damai ini. Di level komunitas internasional, Indonesia sudah melakukan dukungan dan diplomasi yang intens terkait proses perdamaian di Afghanistan dan sudah menghasilkan beberapa hasil positif. Sementara di level domestik, sejauh ini pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai kegiatan dan program kerjasama dengan pemerintah Afghanistan dan beberapa kelompok masyarakat untuk perdamaian. Karena itu perlu dilihat lebih lanjut upaya dan kontribusi Indonesia dalam bina-damai dan pembangunan kapasitas tentang hidup damai di Afghanistan.

Dalam kajian perdamaian di Afghanistan, sudah banyak penelitian dan kajian yang membahas proses perdamaian dan juga keterlibatan Indonesia dalam proses perdamaian di dunia, namun belum ada yang secara spesifik penelitian yang membahas tentang upaya pemerintah Indonesia dalam membantu proses perdamaian khususnya melalui upaya bina-damai. Keterlibatan Indonesia dalam perdamaian di dunia dapat dilihat melalui penelitian tentang keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian PBB (Hutabarat, 2016) dan keterlibatan Indonesia dalam proses perdamaian dalam konflik antara Israel dan Palestina (Sumertha, Ismadi, & Wibowo, 2017). Keterlibatan Indonesia dalam proses perdamaian di negara lain atau di dunia internasional didasarkan karena dorongan politik luar Indonesia yang menganut bebas aktif dan selain itu juga karena Indonesia menolak keras terhadap segala bentuk penjajahan. Pengalaman Indonesia dalam keterlibatan membantu proses perdamaian di dunia internasional salah satunya yaitu pada tahun 1990. Indonesia sebagai mediator proses perdamaian di Kamboja (Runtukahu, 2009). Secara singkat dapat dikatakan Indonesia telah lama terlibat dan berpengalaman dalam proses perdamaian komunitas internasional.

Beberapa laporan dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini membantu menjelaskan konteks proses perdamaian di Afghanistan dan aktor-aktor dalam konteks tersebut termasuk posisi Indonesia. Laporan dari *National Security Research Division RAND Corporation* pada 2011 tentang proses perdamaian Afghanistan memetakan beberapa aktor penting dalam penyelesaian konflik di Afghanistan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya (Shinn & Dobbins, 2011). Beberapa penelitian sebelumnya (Qarqeen, 2015; Fazly, 2016; Kaura, 2018) juga menjelaskan bahwa proses perdamaian di Afghanistan masih belum efektif karena kompleksitas pendekatan struktural dan aktor-aktor yang terlibat meskipun sudah mendapat banyak dukungan dari komunitas internasional. Namun demikian, di luar dari aktor-aktor tersebut dan sejalan bertambahnya waktu, ada banyak pihak atau aktor-aktor lainnya dari komunitas internasional yang selama ini juga terlibat dan berkontribusi pada proses perwujudan dan pembangunan perdamaian di Afghanistan, seperti salah satunya Indonesia.

Dari perjalanan panjang proses perdamaian di Afghanistan, pada 7 Desember 2018 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan laporan resmi tentang situasi Afghanistan dan implikasinya untuk perdamaian dan keamanan internasional. Dalam laporan tersebut proses perdamaian di Afghanistan

dikatakan masih suram karena tingkat kekerasan di Afghanistan masih sangat tinggi yang dilakukan oleh Taliban dan pemberontak lainnya di Afghanistan (General Assembly Security Council UN, 2020).

Laporan terbaru yaitu dari *Congressional Research Service* pada 25 Juni 2020 yang terkait dengan kebijakan Pemerintah Amerika terhadap Afghanistan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Amerika masih menaruh perhatian besar dalam kebijakan luar negerinya terkait perdamaian di Afghanistan. Perjanjian AS-Taliban pada 29 Februari 2020 menjadi momen penting bagi Afghanistan dan kebijakan AS. Namun demikian, pandemi Covid-19 dapat berdampak pada dinamika keamanan dan politik di Afghanistan, serta hubungannya dengan Amerika Serikat dan mitra internasional lainnya (Thomas, 2020).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terkait proses perdamaian di Afghanistan menunjukkan bahwa penelitian dan kajian tersebut berkontribusi banyak pada studi perdamaian dan hubungan internasional khususnya dalam memahami proses perdamaian di Afghanistan dan aktor-aktor yang terlibat serta perkembangannya. Namun beberapa penelitian tersebut tidak membahas secara spesifik upaya atau kontribusi pemerintah Indonesia pada proses perdamaian di Afghanistan khususnya melalui upaya bina-damai (*peacebuilding*). Faktanya sejauh ini pemerintah Indonesia telah terlibat lama dalam proses bina-damai di Afghanistan. Karena itu penting untuk menjelaskan upaya dan kontribusi Indonesia dalam proses perdamaian di Afghanistan sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian perdamaian dalam konteks studi hubungan internasional ini berusaha menjelaskan: bagaimana upaya dan kontribusi dari pemerintah Indonesia untuk proses perdamaian di Afghanistan khususnya melalui bina-damai (*peacebuilding*) dan apakah memiliki kendala baik di level internasional ataupun domestik Afghanistan, dan bentuk bina-damai seperti apa yang dilakukan oleh Indonesia dan apakah cukup signifikan untuk berkontribusi dalam proses perdamaian di Afghanistan. Dengan demikian pembahasan pada tulisan ini berusaha menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai kontribusi untuk proses perdamaian di Afghanistan dan kendala-kendalanya di level internasional dan domestik Afghanistan, serta bentuk bina-damai yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam proses perdamaian di Afghanistan.

METODE

Fokus penelitian ini yaitu upaya dan kontribusi pemerintah Indonesia dalam proses perdamaian di Afghanistan. Penelitian kualitatif dengan sumber pustaka (*library research*) ini menggunakan sumber-sumber penelitian yang dibagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, sumber dari laporan-laporan pemerintah Indonesia seperti laporan Kinerja Tahunan Tetap Republik Indonesia (PTRI) tahun 2020 dari Kementerian Luar Negeri RI. *Kedua*, sumber dari hasil penelitian terdahulu tentang proses perdamaian di Afghanistan dan perkembangannya khususnya yang membahas tentang upaya bina-damai di Afghanistan. *Ketiga*, sumber dari media online yang berkaitan dengan segala upaya dan kontribusi yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia tentang upaya bina-damai untuk proses perdamaian di Afghanistan. Data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan perspektif hubungan internasional dengan konsep '*peacebuilding*' atau dengan istilah lain disebut 'bina-damai.' Kata bina-damai sendiri merujuk pada istilah Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi (Abu-Nimer, 2010).

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial yang terkait dengan fokus permasalahan pembahasan ini. Dengan analisis menggunakan perspektif hubungan internasional, data deskriptif ini diharapkan dapat menghasilkan uraian yang mendalam dan komprehensif pada permasalahan yang dibahas. Analisis dalam penelitian kualitatif ini berusaha menjelaskan keterkaitan data diantaranya mensintesis berbagai aspek menjadi formulasi pada makna yang baru (Saldana & Omasta, 2016, p. 30).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Bina-Damai sebagai Upaya Proses Perdamaian

Perdamaian berasal dari kata damai yang bisa diartikan sebagai ketiadaan perang yang dipandang secara berbeda dari dua teori dominan dalam Ilmu Hubungan Internasional yakni realisme dan liberalisme. Realisme berpandangan bahwa perdamaian adalah sesuatu yang negatif dan utopis yang ditandai dengan ketiadaan perang. Menurut Realisme, hubungan antara kekuasaan, keamanan, dan konflik sangatlah erat sehingga perdamaian akan tercapai ketika sudah mendapatkan keseimbangan kekuasaan (*balance of power*). Realis sulit mempercayai pihak lain dan selalu dipenuhi rasa curiga, sehingga mereka harus melindungi negara mereka sendiri karena mereka tidak dapat bergantung pada pertolongan negara lain (Stefans & Pettiford, 2009, pp. 69-70).

Sedangkan Liberalisme adalah paradigma yang sangat kontras dari paham realisme. Berlainan dengan kepesimisan dari kaum realis, kaum liberalis percaya bahwa manusia dapat bekerja sama dan mewujudkan perdamaian melalui jalan non kekerasan dan perang. Liberalisme, yang juga dikenal sebagai idealisme, berawal dengan asumsi yang berbeda tentang dunia daripada realisme dan percaya dalam mengejar kebijakan yang dapat disebut sebagai kebaikan bersama, bukan apa yang baik untuk negara individu. Liberalisme berpandangan bahwa perdamaian bisa terjadi jika sumber-sumber konflik bisa diselesaikan. Liberalisme juga berpandangan perdamaian akan tercapai jika sebuah negara menganut sistem demokrasi liberal, tidak tirani (Stefans & Pettiford, 2009).

Setelah Perang Dingin berakhir dan terus menguatnya institusi internasional seperti PBB, konflik banyak terjadi tidak lagi pada antar negara tetapi terjadi antara negara dan kelompok masyarakat. Menurut Uppsala Conflict Data Program (UCDP) terjadi penurunan konflik bersenjata sejak berakhirnya Perang Dingin tetapi terjadi peningkatan konflik yang terjadi dalam lingkaran kelompok masyarakat sipil (non-state), khususnya sejak 2014 ketika berdirinya *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS) (Dupuy & Rustad, 2018). Untuk mengakhirinya, perlu adanya pemahaman bina-damai (*peacebuilding*) oleh negara dan kelompok masyarakat. Bina-damai dibangun dengan rasa saling percaya (*trustbuilding*), karena *peacebuilding* tidak dapat terwujud jika tidak adanya *trustbuilding*. Menurut Francis Fukuyama, kata '*Trust*' diselaraskan dengan istilah kepercayaan sebagai harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, dan perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama oleh anggota-anggota komunitas itu. *Trust* juga menjadi bagian penting dalam modal sosial. *Trust* bermanfaat untuk individu dan komunitas bekerja secara hemat dan efisien karena semua anggota sama-sama menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu (Fukuyama, 2002).

Mohammed Abu-Nimer mensejajarkan istilah bina-damai, resolusi konflik, dan nirkekerasan. Ketiga konsep ini menurutnya membutuhkan pendekatan kolaboratif. Ketiganya memiliki kesamaan asumsi bahwa untuk menyelesaikan suatu konflik, para pihak harus berkomitmen pada pendekatan dan metode nirkekerasan. Bagi Nimer, nirkekerasan adalah inti semua program dan pendekatan bina-damai. Kemudian aksi dari bina-damai mendorong resolusi konflik. Oleh karena itu, inti dari itu semua adalah mesti mengandaikan pemahaman tentang bagaimana budaya dan agama suatu masyarakat bertalian dengan nirkekerasan. Bagi Nimer, dalam Islam jelas nilai bina-damai tertera dalam ajaran keadilan ('*adl*), kebaikan (*ihsan*), dan kebijaksanaan. Ketiga ajaran itu jauh dari nilai kekerasan (Abu-Nimer, 2010).

Konsep bina-damai untuk perdamaian di Afghanistan, bukan semata-mata pada pencegahan konflik, resolusi konflik, manajemen konflik, dan transformasi konflik, akan tetapi sebagai sebuah strategi. Bina-damai mendasarkan pada perubahan yang sangat signifikan dalam penanganan konflik yaitu strategi yang berorientasi pada upaya untuk membangun perdamaian. Menurut Bertram konsep ini mulai digunakan secara luas oleh masyarakat dan pembuat kebijakan baru

pada awal dekade 1990an. Istilah '*peacebuilding*' dipopulerkan oleh Johan Galtung pada tahun 1970an. PBB mulai secara serius menggunakan konsep ini sejak 1992 dan menjadikannya sebagai salah satu fokus penting PBB di untuk jalan damai sebuah negara yang berkonflik (Sugiono & Nazala, 2011).

Johan Galtung yang dikenal sebagai pendiri kajian perdamaian (*Peace Studies*) dari Norwegia menggagas istilah dan konsep tiga pendekatan perdamaian yaitu *Peacekeeping*, *Peacemaking*, dan *Peacebuilding* (Galtung, 1976). Secara singkat, perdamaian menurut Galtung adalah ketiadaan kekerasan. Pendekatan pemeliharaan perdamaian (*peacekeeping*) bertujuan untuk mempertahankan tidak adanya kekerasan langsung antar aktor dalam konflik dan membuat adanya jarak antar aktor konflik melalui bantuan pihak ketiga. Kemudian pendekatan penciptaan perdamaian (*peacemaking*) berlabuh dalam resolusi konflik yang bertujuan untuk menghentikan konflik dengan berfokus pada cara-cara untuk mengatasi konflik antar pihak. Penciptaan perdamaian dan resolusi konflik dicapai setelah kesepakatan ditandatangani dan diratifikasi oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan. Sedangkan pendekatan bina-damai (*peacebuilding*) merupakan pendekatan asosiatif terhadap konflik yang dapat mengatasi penyebab langsung, struktural, dan budaya dari kekerasan dalam arti yang paling luas. Penghapusan akar penyebab kekerasan fokus pada beberapa prinsip yaitu 'keadilan' sebagai lawan dari dominasi dan eksploitasi untuk menuju interaksi horizontal dan 'Entropi' sebagai lawan dari elitisme untuk menuju inklusi (Galtung, 1976 dalam Cravo, 2017, pp. 5-7).

Sejalan dengan Galtung, PBB juga menggunakan istilah-istilah dan konsep dasar Galtung tersebut. Menurut PBB, *peacemaking* adalah sebuah upaya diplomatis yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan antara pihak-pihak yang berkonflik yang berujung pada perjanjian damai. Proses *peacemaking* ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga internasional seperti PBB, atau bisa juga lembaga non-pemerintah. Sedangkan *peacebuilding* adalah skema kerja pascakonflik yang bertujuan untuk menghindari atau meminimalisir konflik datang kembali. Hal ini dapat dilakukan dengan penguatan kapasitas nasional di semua level untuk manajemen konflik dan bersandar pada perdamaian dan pembangunan. Proses kompleks ini membutuhkan waktu yang lama untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. Penekanan proses ini yaitu pada isu-isu yang mempengaruhi fungsi masyarakat dan pemerintah serta peningkatan kapasitas negara dalam menjalankan fungsinya (United Nations Peacekeeping, n.d.). Selain itu, menurut laporan PBB pada 2000 yang dikenal dengan Brahimi Report, konsep *peacebuilding* merupakan aktivitas yang lebih mendalam dan berjangka panjang daripada *peacekeeping* dan *peacemaking*. *Peacebuilding* fokus pada kegiatan untuk menyusun kembali fondasi perdamaian dan menyediakan peralatan untuk membangun di atas fondasi tersebut yang tidak hanya mencegah adanya perang, kekerasan atau konflik kembali tetapi lebih dari itu (Brahimi, 2000, p. 3 dalam Frère & Wilen, 2015). *Peacebuilding* juga mengacu pada kegiatan pencegahan atau penyelesaian konflik yang dilakukan oleh aktor eksternal seperti PBB atau organisasi internasional lainnya, atau aktor lokal di tingkat komunitas, dengan tujuan bersama untuk membangun perdamaian berkelanjutan (Frère & Wilen, 2015).

Pembahasan upaya dan kontribusi pemerintah Indonesia dalam proses perdamaian di Afghanistan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama membahas perjalanan bina-damai di Afghanistan sebagai konteks konflik dan proses perdamaian di Afghanistan yang selama ini sudah dilakukan oleh berbagai pihak. Bagian kedua membahas upaya dan kontribusi bina-damai Indonesia untuk Afghanistan khususnya terkait bantuan pembangunan kapasitas (*capacity building*) yang dilakukan oleh Indonesia.

Perjalanan Bina-Damai di Afghanistan

Sepanjang negara Afghanistan berdiri, masyarakatnya selalu diliputi oleh konflik kekerasan yang silih berganti. Pada 1979, Uni Soviet mengintervensi dengan kekuatan militer ke Afghanistan melalui tangan kekuasaan Hafidzullah Amin dari *People Democratic Party of Afghanistan* (PDPA) yang memiliki hubungan baik dengan Pakistan dan Arab Saudi. Soviet menjadikan PDPA sebagai alat kekuasaannya di Afghanistan. Kekuatan militer yang dilakukan oleh PDPA atas dukungan Soviet memicu perlawanan bersenjata dari kelompok Mujahidin (Qarqeen, 2015).

Antara tahun 1985-1986, kelompok Mujahidin akhirnya berhasil memukul mundur kekuatan militer Soviet ("Afghanistan 1979-1992," n.d.). Hingga akhirnya setelah Soviet mengikuti *Geneva Peace Accords* pada April 1988 yang difasilitasi oleh PBB, kemudian pada 15 Februari 1989, Soviet menarik pasukannya di Afghanistan (Katzman, 2012). Setelah penarikan mundur pasukan Soviet, konflik bersenjata di Afghanistan tidak secara otomatis berakhir. Babak baru konflik terjadi antara pemerintah Afghanistan di bawah Presiden Najibullah (yang masih di bawah kontrol Uni Soviet) berhadapan dengan kelompok Mujahidin yang membuat kelompok Mujahidin mengalami kekalahan di Jalalabad pada tahun 1989. Kemudian pada 1991, setelah Soviet runtuh, kelompok Mujahidin mendapatkan kemenangannya. Keruntuhan Soviet juga menandakan perang dingin telah berakhir antara Blok Barat dan Blok Timur (Qarqeen, 2015).

Di tengah rumitnya membangun pemerintahan baru Afghanistan pasca keruntuhan Soviet, pada 1994 muncullah kelompok baru di Afghanistan dengan sebutan Taliban. Taliban berhasil merebut kota Kabul pada September 1996 dan menjadi akhir dari pemerintahan Afghanistan yang dipimpin Hekmatyar dan awal dari terbentuknya *Emirat Islam Afghanistan* di bawah kekuasaan kelompok Taliban (Fazly, 2016). Taliban kemudian membawa Afghanistan dengan model pemerintahan Islam yang sangat represif (Ali, 2014).

Taliban berkuasa di Afghanistan dari 1996-2001. Pada Nopember 2001, Amerika Serikat menggulingkan pemerintahan Taliban atas tuduhan melindungi pimpinan Al-Qaeda yaitu Osama bin Laden karena menjadi dalang serangan teroris pada Menara Kembar WTC di New York Amerika pada 11 September 2001. Afghanistan kembali dinegosiasikan setelah kekuasaan Taliban dengan membentuk pemerintah transisi Afghanistan tanpa Taliban melalui perjanjian Bonn pada 2001. Negosiasi berikutnya kemudian melibatkan Taliban setelah Taliban melakukan pemberontakan yang terus mengganggu jalannya pemerintahan di Afghanistan. Dari tahun 2006 hingga 2009 pemberontakan meningkat secara signifikan sebesar 48,52 persen dan pada tahun 2010 Taliban telah menguasai hampir lebih dari separuh negara. Sedangkan untuk tahun 2015, mereka masih menguasai provinsi-provinsi selatan Afghanistan (Qarqeen, 2015). Sejak terbentuknya pemerintahan transisi Afghanistan di bawah pengawasan Amerika dan PBB pada 2001 ("Timeline: The Fall of Kabul," 2001), pemberontakan, teror, kekerasan, dan konflik yang dilakukan oleh Taliban terus berlangsung di Afghanistan. Pada 7 Desember 2018, PBB menyampaikan data bahwa tingkat kekerasan di Afghanistan masih tinggi dimana antara 1 Januari sampai 30 September 2018 masih terjadi kekerasan yakni 2.798 orang terbunuh dan 5.252 mengalami luka dalam aksi kekerasan di Afghanistan (General Assembly Security Council UN, 2020).

Sirajuddin Haqqani, wakil pemimpin dari Taliban menulis artikel dalam *The New York Times* pada 20 Februari 2020, mengatakan bahwa peperangan yang dilakukannya dengan pihak asing yang dipimpin Amerika bukanlah keinginannya tapi dipaksa untuk membela diri. Proses negosiasi yang dimulai oleh Taliban dengan Amerika sudah dimulai sejak 2018 dengan menyimpan ketidakpercayaan kepada pihak Amerika yang mau menyelesaikan konflik di Afghanistan. Bagi Taliban, penarikan pasukan asing adalah yang utama dan terpenting dalam proses negosiasi itu (Haqqani, 2020).

Proses perdamaian di Afghanistan mengalami perkembangan lebih maju ketika pada 29 Februari 2020, perjanjian perdamaian antara Amerika-Taliban ditandatangani di Doha, Qatar. Perjanjian perdamaian itu bernama *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) untuk Perdamaian Afghanistan. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri menjadi salah satu yang menyaksikan perjanjian bersejarah itu (“Dorong Perdamaian Di Afghanistan, Menlu RI Saksikan Penandatanganan Perjanjian AS-Taliban,” 2020). Proses negosiasi tersebut kemudian membawa kedua pihak antara Amerika dan Taliban menyetujui empat hal penting sebagai perjanjian yaitu: melakukan kontra-terorisme, Amerika menarik pasukannya dari Afghanistan dalam 14 bulan, perundingan intra-Afghanistan, dan gencatan senjata. Namun Amerika berjanji akan menarik pasukannya secara bertahap jika Taliban dan sekutunya termasuk Al Qaeda tidak melakukan ancaman dan tindakan teror terhadap Amerika dan sekutu-sekutunya (Kemlu.go.id, 2020).

Upaya dan Kontribusi Bina-Damai Indonesia untuk Afghanistan

Dalam laporan Kinerja Tahunan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) tahun 2020, terlihat jelas bagaimana Indonesia memasukan Afghanistan sebagai upaya mencari dukungan internasional guna menjadi isu bersama untuk perdamaian di Afghanistan. Indonesia mencatat beberapa capaian yang telah dilakukan, diantaranya memfasilitasi *travel exemption* bagi beberapa orang Taliban yang masuk dalam daftar sanksi Komite Taliban 1988 dan bersama Jerman menginisiasi pertemuan Dewan keamanan (DK) PBB mengenai kunjungan ke Afghanistan dengan agenda *Women, Peace, and Security*. Indonesia juga telah melakukan 31 pertemuan bilateral tingkat Menteri Luar Negeri yang terdiri dari pertemuan bilateral dengan Aljazair, Armenia, Australia, dan Timor Leste (Trilateral), Bangladesh, Belanda, Bahrain, Ceko, Estonia, Ethiopia, Equatorial Guinea, Guatemala, Hungaria, Kamerun, Kyrgyztan, Luxembourg, Maroko, Pantai Gading, PNG, Qatar, Republik Dominika, Rumania, Saudi Arabia, Sudan Selatan, Solomon Islands, Uni Emirate Arab, Yordania, Yunani, Presiden SMU-74 PBB, *Assistant Secretary for Asia Pacific Affairs*, *US Special Envoy for Afghanistan*, dan *UN Special Envoy on Myanmar* untuk menggalang dukungan internasional terkait proses perdamaian di Afghanistan. Pada tahap sebelumnya, Indonesia juga menggandeng Jerman yang berhasil menyusun 2 Resolusi DK PBB untuk memperpanjang mandat Misi PBB untuk bantuan di Afghanistan yang bernama *United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA) yang disahkan secara konsensus pada Maret 2019 dan September 2019 (“Laporan Kinerja Tahunan 2019,” 2020).

Di level domestik Afghanistan, Indonesia mendapat dukungan domestik dalam membantu proses perdamaian di Afghanistan. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri, dipercayai sebagai *Honorary Member Group of Friends of Women in Afghanistan* bersama dengan *First Lady* Afghanistan, Rula Ghani, dan Rt Hon. Baroness Hodgson of Abinger, CBE. Selain itu, Indonesia juga berhasil memasukkan rujukan mengenai *Trilateral Ulema Conference* yang diselenggarakan di Jakarta pada Mei 2018 dalam Resolusi Sidang Majelis Umum terkait situasi di Afghanistan. Kemudian untuk pertama kalinya, Indonesia juga diundang menjadi anggota inti group untuk isu Afghanistan di Sidang Majelis Umum (“Laporan Kinerja Tahunan 2019,” 2020).

Upaya Indonesia terlibat dalam membantu proses perdamaian di Afghanistan sudah sejak lama dilakukan. Indonesia berkomitmen untuk membantu perdamaian di Afghanistan dan menjadi negara yang aman, sejahtera, dan demokratis diantaranya melalui: bantuan kerja sama untuk Afghanistan secara bilateral maupun melalui pihak ketiga berupa pelatihan-pelatihan (*capacity building*) di beberapa bidang seperti demokrasi, pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi, pertanian, dan lainnya, termasuk program beasiswa untuk pegawai pemerintah dan masyarakat Afghanistan. Apa yang telah dilakukan Indonesia ini sejalan dengan misi PBB dengan program UNAMA sesuai resolusi DK PBB 1662 tahun 2006, 746 tahun 2007, dan 1868 tahun 2009 dimana Indonesia turut berkontribusi dalam proses perdamaian dan pembangunan di Afghanistan (Tabloid Diplomasi, 2017).

Bantuan dari Indonesia untuk Afghanistan tersebut dalam program Kerjasama Teknik Negara-Negara Berkembang (KTNB). Indonesia bekerjasama dengan pihak donor untuk Afghanistan diantaranya yaitu melalui program: pendidikan tinggi di bidang Public Health, Neonatal and Child Health Service, Group Training on Agribusiness Technology, Training on Maternal, Training on Community Medicine, dan Training on Empowering Women through Social Economic and Culture (*reproductive health*) (Tabloid Diplomasi, 2010). Pada 2010 dan 2011, Indonesia kembali bekerjasama dengan Jepang untuk melanjutkan program bantuan untuk masyarakat Afghanistan mengikuti beberapa pelatihan di Indonesia. Antara tahun 1981 - 2010, Indonesia telah melibatkan lebih dari 120 perwakilan masyarakat Afghanistan dari aparaturnegara dan masyarakat sipil untuk program *capacity building* dalam beberapa bidang tersebut (Tabloid Diplomasi, 2017). Sedangkan di bidang pendidikan, Indonesia juga membangun kerjasama antar universitas dua negara dan program beasiswa untuk masyarakat Afghanistan. Pendidikan dalam hal ini juga termasuk *capacity building* untuk pemberdayaan wanita (*women empowerment*) dalam pembangunan ekonomi dan perdamaian (Masyrafina & Damhuri, 2017).

Di bidang ekonomi juga menunjukkan kerjasama Indonesia dan Afghanistan yang berjalan baik. Salah satunya dapat dilihat melalui meningkatnya hubungan antara sektor swasta Indonesia dan Afghanistan seperti partisipasi pengusaha Afghanistan pada Trade Expo Indonesia tahun 2017 sebesar 300 persen atau lebih dari 100 pengusaha Afghanistan. Kemudian pemerintah Indonesia juga berperan menjembatani dan memfasilitasi BUMN Indonesia dalam beberapa proyek kerjasama ekonomi di Afghanistan. Selain itu juga kerjasama di bidang sosial budaya, seperti pembangunan Indonesia Islamic Center dan Masjid Assalam serta hibah pembangunan klinik kesehatan pada 2019 (Masyrafina & Damhuri, 2017).

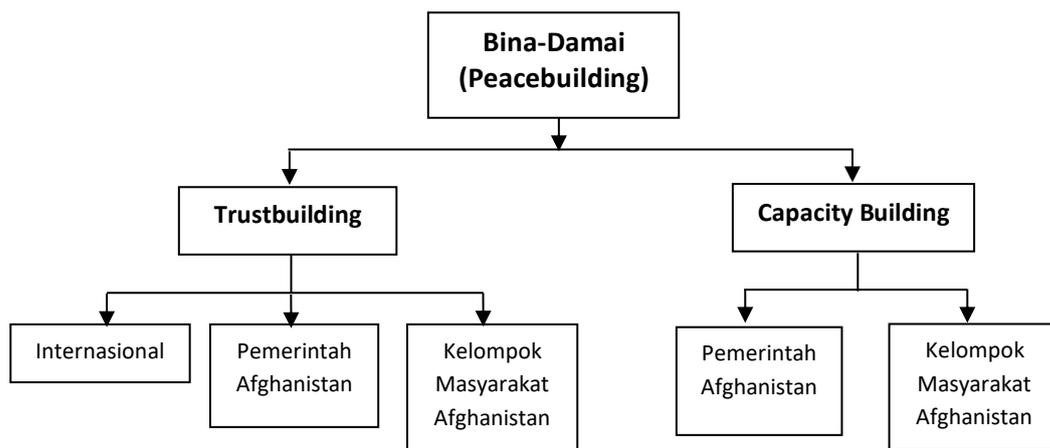
Pada tahun 2019, Indonesia juga menyelenggarakan program untuk perempuan Indonesia dan Afghanistan di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Presiden Ghani Afghanistan sangat mengapresiasi komitmen Indonesia khususnya Presiden Joko Widodo dalam mendorong perdamaian di Afghanistan. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas beberapa langkah lanjutan kerjasama Indonesia-Afghanistan untuk mendorong perdamaian di Afghanistan, seperti program *Intra Afghan Dialogue*, keterlibatan ulama, dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Terkait dengan pelibatan ulama, pada 2018 Indonesia juga pernah mengadakan Pertemuan Trilateral Ulama dari Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia (Kemlu.go.id, 2020).

Selain itu, pemerintah Indonesia juga memfasilitasi hubungan pemerintah Afghanistan dan kelompok masyarakat Afghanistan dengan kelompok masyarakat Indonesia melalui beberapa kunjungan dan forum komunikasi di Indonesia. Kunjungan Pemerintah Afghanistan dan kelompok masyarakat Afghanistan di Indonesia selain kepada Pemerintah Indonesia juga pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi Islam moderat di Indonesia yang di wakili oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang telah dilakukan beberapa tahun khususnya sejak Presiden Afghanistan Ashraf Ghani berkunjung ke Jakarta pada 5 April 2017. Sejak itu berbagai pertemuan maupun kegiatan kerjasama diantara kelompok masyarakat Afghanistan dan Indonesia terjalin di Indonesia maupun di Afghanistan yang salah satunya untuk mendorong proses perdamaian di Afghanistan.

Bentuk atau model bantuan bina-damai melalui berbagai kegiatan khususnya penguatan kapasitas (*capacity building*) ini seperti yang dikatakan oleh Johan Galtung yaitu untuk menghindari konflik atau untuk mencegah terjadinya konflik kembali dan untuk membangun perdamaian pasca konflik. Karena itu untuk membangun perdamaian di Afghanistan ini perlu berbagai upaya untuk mengisinya dengan berbagai kerjasama internasional dan program yang melibatkan komunitas internasional dan berbagai elemen domestik Afghanistan. Kontribusi Indonesia dapat dilihat dari hubungan internasional melalui dukungan di komunitas internasional dengan terus menggalang dukungan proses perdamaian untuk Afghanistan, dan kerjasama di beberapa bidang dengan Afghanistan seperti pendidikan, ekonomi, pertanian, kesehatan, sosial budaya, pemberdayaan

perempuan, dan demokrasi. Hal ini bisa dilihat dari berbagai kerjasama dan program Indonesia untuk Afghanistan untuk aparat pemerintah dan komunitas masyarakatnya sejak tahun 1980an sampai saat ini tahun 2020 dan komitmen dukungan berkelanjutannya untuk perdamaian Afghanistan kedepannya.

Dari perjalanan Indonesia terkait Afghanistan ini maka dapat juga dikatakan Indonesia telah menjalin kerjasama dengan berlandaskan saling percaya (*trustbuilding*) antara Indonesia, komunitas internasional, serta pemerintah Afghanistan serta domestik atau masyarakat Afghanistan. Adanya sikap saling percaya ini seperti yang dikatakan Fukuyama sehingga dapat terjalin kerjasama bina-damai di berbagai bidang untuk kepentingan bersama hingga kini khususnya untuk perdamaian di Afghanistan. Alur upaya bina-damai yang dilakukan Indonesia untuk Afghanistan tergambar dalam bagan berikut ini:



Grafik 1. Alur proses bina-damai Indonesia untuk Afghanistan

Berdasarkan hubungan Indonesia dengan Afghanistan tersebut, Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu aktor dalam komunitas internasional yang berkontribusi dalam mendorong bina-damai (*peacebuilding*) di Afghanistan melalui kerjasama antar negara dan program-program lainnya khususnya program *capacity building*. Mesti tidak disebut sebagai aktor utama atau aktor penting dalam peta penyelesaian konflik di Afghanistan, upaya Indonesia untuk proses perdamaian di Afghanistan juga memiliki kontribusi penting untuk perdamaian di Afghanistan dan komunitas internasional.

SIMPULAN

Berbagai upaya yang dilakukan Indonesia untuk membantu proses perdamaian di Afghanistan cukup panjang. Sampai saat ini Indonesia masih terlibat dalam proses tersebut dan tetap berkomitmen dalam perdamaian Afghanistan ke depannya. Di level internasional, Indonesia dapat menggalang dukungan internasional untuk terus membantu proses perdamaian di Afghanistan. Kontribusi Indonesia sangat signifikan dalam hal penggalangan dukungan internasional seperti melalui perpanjangan misi bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Afganisan untuk perdamaian Afghanistan. Di level domestik Afghanistan, Indonesia juga mendapat dukungan dari domestik Afghanistan untuk membantu proses perdamaian di Afghanistan sehingga beberapa kerjasama terus berlangsung. Indonesia berkontribusi dalam proses perdamaian di Afghanistan utamanya melalui bina-damai (*peacebuilding*) melalui kerjasama-kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Afghanistan atau melalui pihak ketiga (donor). Cara bina-damai ini utamanya dilakukan melalui pembangunan kapasitas (*capacity building*) untuk Afghanistan dari kalangan aparat pemerintah dan juga kelompok masyarakat sipilnya melalui berbagai program seperti pendidikan, pelatihan, workshop dan pertemuan atau kunjungan kedua belah pihak. Kontribusi

Indonesia dalam hal *capacity building* juga cukup signifikan untuk membantu pemerintah dan masyarakat Afghanistan dalam meningkatkan kualitas dan kapasitasnya di beberapa bidang kerjasama untuk pembangunan nasional Afghanistan berkelanjutan dan untuk mengisi pembangunan perdamaian dalam upaya menciptakan negara yang aman, demokratis, dan sejahtera. Hubungan kerjasama Indonesia dan Afghanistan untuk bina-damai ini dapat terjalin karena sudah terbangun rasa saling percaya (*trustbuilding*) antar kedua belah pihak sehingga dapat bekerjasama dan menempatkan kepentingan bersama. Bina-damai yang dilakukan ini untuk mencegah dan menghindari terjadinya konflik kembali dan juga sebagai strategi membangun fondasi pasca konflik yang berorientasi pada pembangunan perdamaian jangka panjang di Afghanistan.

REFERENSI

- Abu-Nimer, M. (2010). *Nir Kekerasan dan Bina-Damai dalam Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi.
- Afghanistan 1979-1992. (n.d.). Retrieved from GlobalSecurity.org website: <https://www.globalsecurity.org/intell/ops/afghanistan.htm>.
- Ali, A. S. (2014). *Al Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi, dan Sepak Terjangnya*. Jakarta: LP3ES.
- Brahimi, L. (2000). *Report of the Panel on United Nations Peace Operations [A/55/305]*. New York. Retrieved from https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/a_55_305_e_brahimi_report.pdf.
- Cravo, T. A. (2017). Peacebuilding: Assumptions, practices and critiques. *Janus.Net e-Journal of International Relations*, 8(1), 4-20.
- Diplomasi Indonesia Loloskan Resolusi DK PBB tentang Afghanistan. (2019, September). Retrieved from PTRI New York website: <https://kemlu.go.id/newyork-un/en/news/2441/diplomasi-indonesia-loloskan-resolusi-dk-pbb-tentang-afghanistan>.
- Dorong Perdamaian di Afghanistan, Menlu RI Saksikan Penandatanganan Perjanjian AS-Taliban. (2020, March 1). Retrieved February 7, 2021, from VOA Indonesia website: <https://www.voaindonesia.com/a/ikut-dorong-perdamaian-di-afghanistan-menlu-ri-saksikan-penandatanganan-perjanjian-as-taliban-/5310491.html>.
- Dupuy, K., & Rustad, S. A. (2018). *Trends in Armed Conflict, 1946-2017, Conflict Trends (5)*. Oslo. Retrieved from <https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=11181>.
- Fazly, H. (2016). *The Deadlock of Afghan Peace Process*. International Institute of Social Studies.
- Frère, M.-S., & Wilen, N. (2015). *INFOCORE Definitions: "Post-conflict."* Bruxelles. Retrieved from https://www.infocore.eu/wp-content/uploads/2016/02/def_post-conflict.pdf.
- Fukuyama, F. R. (2002). *Trust: Kebijakan, Sosial dan Penciptaan Kemakmuran* (1st ed.). Yogyakarta: Qalam.
- Galtung, J. (1976). *Peace, War and Defense*. Copenhagen: Chr. Ejlers Forlag.
- General Assembly Security Council UN. (2020). *The Situation in Afghanistan and Its Implications for International Peace and Security*. New York.
- Goodhand, J. (2008). Corrupting or Consolidating the Peace? The Drugs Economy and Post-conflict Peacebuilding in Afghanistan. *International Peacekeeping*, 15(3), 405-423. <https://doi.org/10.1080/13533310802058984>.
- Haqqani, S. (2020). What We, the Taliban, Want. Retrieved from The New York Times website: <https://www.nytimes.com/2020/02/20/opinion/taliban-afghanistan-war-haqqani.html>.
- Hutabarat, L. F. (2016). Diplomasi Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(2), 75-96. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i2.308>.
- Indonesia Siap Berkontribusi Proses Perdamaian di Afghanistan. (2019, March 15). Retrieved February 7, 2021, from ANTARA News website: <https://www.antaranews.com/berita/810347/indonesia-siap-berkontribusi-proses-perdamaian-di-afghanistan>.
- Katzman, K. (2012). Afghanistan: Post-taliban governance, security and US policy. In *The Middle East in Turmoil* (pp. 1-122).
- Kaura, V. (2018). *Understanding the Complexities of the Afghan Peace Process* (No. 151).
- Kemenlu. (2011). *Buku Diplomasi 2011*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI.
- Kemlu.go.id. (2020, March). Kunjungi Kabul, Menlu Retno Dukung Proses Perdamaian di Afghanistan.
- Laporan Kinerja Tahunan 2019. (2020). In *PTRI New York*. New York. Retrieved from <https://kemlu.go.id/newyork-un/en/pages/akip/1006/etc-menu>.

- Masyrafina, I., & Damhuri, E. (2017). Indonesia-Afghanistan Tingkatkan Kerja Sama Bilateral.
- Qarqeen, F. (2015). *Afghan Peace Talks: Negotiating with the Taliban*. American University of Central Asia.
- Rubin, B. R. (2006). Peace Building and State-Building in Afghanistan: Constructing Sovereignty for Whose Security? *Third World Quarterly*, 27(1), 175–185. <https://doi.org/10.1080/01436590500370038>.
- Runtutahu, M. A. (2009). *Peran Indonesia dalam Proses Penyelesaian Konflik Kamboja (Periode 1984-1991)*. Universitas Indonesia.
- Saldana, J., & Omasta, M. (2016). *Qualitative Research: Analyzing Life* (1st ed.). California: SAGE Publications.
- Shinn, J., & Dobbins, J. (2011). *Afghan Peace Talks: A Primer*. Santa Monica: The RAND Corporation.
- Stefans, J., & Pettiford, L. (2009). *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema* (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono, M., & Nazala, R. M. (2011). *Peacebuilding dan Resolusi Konflik dalam Perspektif PBB*. Retrieved from https://www.academia.edu/1144076/Peacebuilding_dan_Resolusi_Konflik_dalam_perspektif_PBB.
- Sumertha, I. G., Ismadi, A., & Wibowo, H. A. (2017). Keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam Proses Perdamaian Konflik Israel-Palestina. *Jurnal Prodi Damai Dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan*, 3(1), 1–28.
- Tabloid Diplomasi. (2010). Indonesia Mendukung Upaya Perdamaian di Afghanistan.
- Tabloid Diplomasi. (2017). Diplomasi Indonesia di Kawasan Asia Tengah dan Selatan.
- Thomas, C. (2020). *Afghanistan: Background and U.S. Policy: In Brief*. Retrieved from <https://fas.org/sgp/crs/row/R45122.pdf>.
- Timeline: the fall of Kabul. (2001, November 13). Retrieved February 7, 2021, from The Guardian website: <https://www.theguardian.com/world/2001/nov/13/afghanistan.terrorism18>.
- United Nations Peacekeeping. (n.d.). Terminology. Retrieved from peacekeeping.un.org website: <https://peacekeeping.un.org/en/terminology>.